

## ABSTRAK

Mediasi penyelesaian sengketa kesehatan pada awalnya merupakan alternatif penyelesaian sengketa, ketika mekanisme litigasi dipandang tidak memuaskan. Disertasi dengan judul rekonstruksi hukum mediasi dalam perselisihan pelayanan kesehatan bagi pasien rumah sakit yang berbasis nilai keadilan

Penelitian ini bertujuan menemukan realitas penggunaan mediasi dalam perselisihan pelayanan kesehatan bagi pasien rumah sakit saat ini, menganalisis perbandingan mediasi dalam perselisihan pelayanan kesehatan serta merekonstruksi mediasi perselisihan pelayanan kesehatan bagi pasien rumah sakit yang berbasis nilai keadilan.

Penelitian dilakukan dengan pendekatan yuridis empiris, terkait pelaksanaan mediasi perselisihan pelayanan kesehatan. Sampel dilakukan secara *purposive non random sampling*. Narasumber adalah semua pihak yang terlibat dalam kegiatan mediasi penyelesaian perselisihan pelayanan kesehatan, yang terdiri dari keluarga pasien, pengacara, rumah sakit/ dokter, polisi dan notaris. Hasil penelitian dianalisa lalu diuraikan secara deskriptif kualitatif.

Hasil Penelitian menunjukkan bahwa realitas pelaksanaan mediasi kesehatan belum dilaksanakan sesuai dengan Pasal 29 Undang-undang No. 36 Tahun 2009 Tentang Kesehatan yang memerintahkan mediasi dalam hal terjadi sengketa pelayanan medis dan Peraturan Mahkamah Agung No. 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan. Temuan penelitian mendapati bahwa Mediasi yang ada dilakukan dengan melibatkan aparat kepolisian, pengacara atau notaris. Setelah membandingkan model mediasi yang dilakukan di Jepang, Malaysia dan Singapura maka diperoleh suatu konstruksi mediasi perselisihan pelayanan kesehatan yang berbasis nilai keadilan yaitu:

- a. Rekonstruksi Nilai dengan cara musyawarah mufakat. Mengupayakan mediasi ketimbang litigasi. Mediasi ditujukan untuk mencapai *win-win solution* berupa pemberian ganti rugi pada pasien.
- b. Rekonstruksi hukum berupa Perubahan UU No 29 Tahun 2004 tentang Praktek Kedokteran khususnya dengan penambahan sub pasal pada Pasal 64 dan Pasal 72.

Teori Segitiga Mediasi dibutuhkan untuk menghasilkan mediasi yang memenuhi harapan semua pihak. Mediasi bukan sekedar bersifat alternatif dalam penyelesaian sengketa, namun mediasi bersifat imperatif bagi para pihak yang bersengketa dalam pelayanan kesehatan. Rekomendasi agar dalam penyelesaian melalui mediasi bersifat imperatif serta perlunya ada lembaga mediasi khususnya bidang kesehatan

Kata kunci : Mediasi, Perselisihan Pelayanan Kesehatan, Nilai Keadilan

## ABSTRACT

Mediation dispute resolution health was originally an alternative dispute resolution, when the mechanism of litigation is deemed unsatisfactory. Dissertation with the title of the reconstruction of legal mediation in disputes over health care for hospital patients based on values of justice. This study aims to discover the reality of the use of mediation in disputes over health care for hospital patients today, analyzing the ratio of mediation in disputes over health services and dispute mediation reconstruct health services for hospital patients based on values of justice.

Research carried out by empirical juridical approach, related to the implementation of health care dispute mediation. Samples were taken by purposive non-random sampling. Informant is all parties involved in the dispute resolution mediation health services, which consist of the patient's family, lawyers, hospitals / doctors, police officers and notaries. Results were analyzed and described by descriptive qualitative.

Research shows that the reality of the implementation of the health mediation has not been carried out in accordance with Article 29 of Act 36 of 2009 on Health ordered mediation in the event of a dispute of medical services and the Supreme Court Regulation No. 1 Year 2016 on Procedures for Mediation in the Court. The findings of the study found that the existing mediation done by involving the police, lawyer or notary. After comparing the model of mediation conducted in Japan, Malaysia and Singapore it is obtained a construction dispute mediation, health services based on values of justice, namely:

- a. Reconstruction of value by way of consensus. Seek mediation rather than litigation. Mediation aims to achieve a win-win solution for the provision of compensation to patients.
- b. Reconstruction of the legal form of Amendment Act No. 29 of 2004 on the Practice of Medicine, especially with the addition of sub-section on Article 64 and Article 72.

Triangular Theory of mediation Mediation is required to produce that meets the expectations of all parties. Mediation is not just an alternative dispute resolution, but mediation is imperative for the parties to the dispute in the health service. Recommendation that the settlement through mediation is imperative as well as the need for a mediation agency especially health

Keywords: Mediation, Dispute Health Services, Justice Values